INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Jln. Wolter Monginsidi Lateri – Ambon
ptun-ambon.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara = sisa perkara Tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus Diselesaikan (sisa awal Tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima Tahun berjalan ditambah sisa perkara Tahun sebelumnya • Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada Tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara Tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada Tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan Upaya Hukum, maka semakin puas atas Putusan Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** • PERMENPAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100% **Catatan :** Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan Putusan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}$ x 100% **Catatan :** Tepat waktu untuk Permohonan Banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Putusan yang menarik perkatian masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak Diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara Sengketa Pemilu yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang Diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ **Catatan** : Perma No: 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen: TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ **Catatan** : Jumlah Putusan perkara yang BHT = Putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai Eksekutorial (executable)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KENERJA UTAMA TAHUN 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	92 %	92%
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara	65 %	30 %	50 %
		d. Persentase Perkara yang tidak megajukan Upaya Hukum Banding	85%	69 %	81 %
		e. Index respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	85 %	56 %	65 %
2.	Peningkatan Ekfektivitas Penggelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ketua

ANDRY ASANI, S.H.M.H.
NIP. 197104091996031001